



RENCANA KERJA 2020 (RENJA)



2020

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SPKD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Provsu mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Penyusunan rancangan Rencana Kerja dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil OPD sesuai Peraturan Gubernur nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sususnan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu, rencana pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu. Dari evaluasi tersebut dapat direncanakan antisipasi terhadap pelaksanaan program di masa yang akan datang agar dapat disusun secara terpadu guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Rencana Kerja SKPD.
2. Tahap penyajian Rencana Kerja SKPD.

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provsu Tahun Anggaran 2018 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana

indikatif dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2020, mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selaras dengan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu.

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu pada Renstra ditetapkan sebanyak 4 (empat) indikator kinerja pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Tersedianya dokumen anggaran
3. Pembangunan dan implementasi e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang e-budgeting
4. Melakukan percepatan penyusunan dokumen anggaran, penatausahaan dan realisasi anggaran.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;.
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 30).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan Renja SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, Sedangkan tujuannya adalah menyusun program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara serta untuk mengetahui :

1. Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.
2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.
3. Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.
4. Target Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.
5. Pagu indikatif program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.
2. Mengevaluasi Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun sebelumnya.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun sebelumnya.
4. Perumusan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.
5. Sebagai salah satu dokumen pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) 2020 adalah sebagai berikut :

BAB. I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Renstra OPD
- 2.2 Analisa Kinerja pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal OPD

BAB. III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan
- 3.4. Program dan Kegiatan Prioritas

BAB. IV. P e n u t u p

B A B I I

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Untuk menjaga konsistensi terhadap capaian target kinerja antara perencanaan dengan pelaksanaan dan untuk mengambil langkah-langkah penyempurnaan perlu dilakukan review terhadap Renja SKPD tahun lalu yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana realisasi program dan kegiatan bila dibandingkan dengan Renstra dan prakiraan capaian kinerja pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran terlebih dahulu perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan salah satu sarana untuk mengukur pengeluaran belanja dengan kinerja yang dihasilkan atau yang disebut dengan metode penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dan terukur dalam penyusunan anggaran yang dilakukan suatu organisasi sector public dengan menggunakan indikator kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun program kegiatan.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), indikator keluaran (output) dan hasil (outcome). Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Berdasarkan program dan kegiatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu pada pelaksanaan sejumlah kegiatan melalui program yang ada, dengan menggunakan dana APBD yang telah dianggarkan pada setiap tahunnya dan mengevaluasi serapan keuangan pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan.

Program/kegiatan prioritas dalam mendukung program pembangunan daerah yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu dapat dilihat sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu Tahun Anggaran 2018 menganggarkan anggaran untuk program dan kegiatan yaitu:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran/Keuangan
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyediaan Makanan dan Minuman
8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
9. Publikasi/Iklan/Layanan masyarakat

10. Penyediaan Jasa Kebersihan
11. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
12. Penyediaan Jasa Keamanan

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
2. Pengadaan Komputer
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4. Pengadaan Sarana Mobilitas Darat
5. Pengadaan Cenderamata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
6. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Kegiatan Sensus Barang Milik Daerah ke-VIII
2. Pengelolaan Aset dan Barang Persediaan Menggunakan Aplikasi SIMDA BMD
3. Pendidikan dan pelatihan formal
4. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Keuangan di Kabupaten/Kota

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan dan Semesteran APBD
2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penyelesaian Dokumen Penetapan Kinerja
3. Penyusunan Anggaran Kas Pemprov APBD dan P.APD TA.. 2018
4. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
5. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
6. Pengelolaan Pajak PPN dan PPH
7. In House Training Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Aktual di Lingkungan Pemprov
9. Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Pemprov

10. Migrasi Data Dari Aplikasi SIMDA Keuangan ke Aplikasi E-Keuangan
11. Pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

f. Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah

1. Penyusunan APBD Provinsi Sumatera Utara
2. Tim Pembinaan Administrasi Gaji PNS Daerah pada SKPD di Lingkungan Pemprov
3. Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara
4. Penyusunan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sumatera Utara
5. Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara
6. Verifikasi DPA/DPPA/DPAL SKPD Pemprov
7. Verifikasi RKA/ RKA Perubahan SKPD Pemprov
8. Tim Pengelolaan Penyusunan Anggaran berbasis Aplikasi Online
9. Pembuatan Sistem E-Keuangan
10. Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD
11. Peningkatan Kualitas Pelayanan Sistem Cash Management System (CMS)
12. Tim Penatausahaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dan Belanja Hibah
13. Penyusunan RKA BPKAD dan RKA BPKAD Perubahan APBD
14. Penyusunan Renja BPKAD Provsu
15. Penyusunan DPA BPKAD dan DPPA BPKAD Provsu
16. Penyimpanan, Penataan dan Pengarsipan Berkas BPKAD Provsu
17. Pengembangan Website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
18. Tim Informasi Media Sosial dan SMS pengaduan BPKAD
19. Sosialisasi Pajak PPn dan PPh Pasal 22, 23, Final Pasal 4 ayat 2
20. Rekonsiliasi Data Belanja Dana Bagi Hasil Provinsi kepada Kab/Kota
21. Koordinasi dan Pelaporan Dana Transfer Provinsi Sumatera Utara
22. Penyusunan Renstra BPKAD Provsu 2018-2023
23. Penyusunan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2018
24. Pengelolaan Aplikasi E-Keuangan Integrasi Cash Management System (CMS) dalam Penatausahaan Keuangan
25. Evaluasi APBD Kabupaten/Kota
26. Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota

27. Penyusunan dan Rekapitulasi data APBD Kab/Kota
28. Monitoring dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota
29. Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD

g. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Penyusunan penggolongan dan kodefikasi BMD terkait penyusunan Standar Harga Barang
2. Pemuktahiran Data Aset Tetap Milik Pemprov untuk bahan neraca per 31 Desember Tahun 2017
3. Tim Task Force Pembenahan Aset
4. Pengurusan dan pembaharuan sertifikasi tanah milik Pemprov
5. Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan barang tidak bergerak milik pemprov
6. Peningkatan Kualitas SDM Dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah
7. Evaluasi Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKPBM) dan Evaluasi Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) dan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKPBM) serta Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBM)
8. Monitoring dan Verifikasi Penatausahaan Aset Pasca Penyerahan P3D akibat UU No. 23 Tahun 2014
9. Penyusunan Buku Realisasi Pengadaan Barang Belanja langsung
10. Monitoring dan Verifikasi Penatausahaan Aset akibat pembentukan SOTK baru sesuai dengan Pergub No. 38 dan 39 Tahun 2016
11. Monitoring dan Tindak lanjut LHP BPK RI Perwakilan Sumatera Utara
12. Penaksiran/Penilaian dalam rangka penjualan barang milik daerah Prov
13. Pemanfaatan Penetapan Status BMD
14. Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Prov
15. Konsultasi, Koordinasi dan Komparasi Peraturan dan Kebijakan Daerah terkait pemanfaatan Barang Milik daerah
16. Penyusunan Laporan Tahunan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
17. Penyusunan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
18. Pelaksanaan Apel Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemprov
19. Pengadaan Tanah untuk Islamic Center

Sesuai dengan Laporan Realisasi Fisik, Keuangan dan Aset SKPD Badan Pengelolaan keuangan Dan Aset Daerah Provsu, terdapat Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 76.773.137.270,52 dengan realisasi sebesar Rp. 52.202.739.397,00. Kemungkinan perbedaan antara program dan kegiatan yang direncanakan dan telah dilaksanakan dalam Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu dengan program dan kegiatan yang ditampung di dalam APBD Provsu yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan struktur organisasi , dan kebutuhan akan kegiatan baru sesuai dengan terbitnya peraturan gubernur tentang pembentukan Bidang yang baru dan penghapusan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel 2.1 yaitu akhir periode pelaksanaan Renja SKPD.

2.2. Analisis Kinerja pelayanan SKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyusunan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan OPD. Selain itu melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan

pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah diukur berdasarkan sasaran/target Renstra perangkat daerah periode sebelumnya. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mengacu pada peraturan dan perundang-undangan tersebut diatas.

Capaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu pada Renstra 2017-2018 antara lain:

1. Pada pengelolaan pendapatan daerah telah digunakan aplikasi Penerimaan Online yang terdapat pada menu aplikasi E-Keuangan dan terintegrasi dengan aplikasi pada PT. Bank Sumut sehingga setiap setoran dapat diketahui jenis dan jumlah penerimaan daerah dan dapat diketahui jumlah seluruh pendapatan daerah pada setiap saat atau secara real time.
2. Untuk pengelolaan belanja daerah telah digunakan aplikasi E-Keuangan yang dimulai dengan penganggaran, penggunaan dan laporan belanja daerah sehingga tercipta penatausahaan yang baik.
3. Pada pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/Aset telah menggunakan aplikasi Simbada Online. Aplikasi ini telah terintegrasi dengan OPD sehingga data Barang Milik Daerah (BMD)/ Aset Provinsi Sumatera Utara dapat diperoleh secara akurat.

Hambatan utama pada penyelenggaraan pelayanan antara lain:

1. Kurangnya sumberdaya manusia (ASN) untuk menggunakan aplikasi sehingga masih mengguna tenaga operator dari luar.

2. Kurangnya sarana dan prasarana sehingga masih terdapat hambatan untuk Melaksanakan kegiatan-kegiatan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pada umumnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat terlaksana dengan baik. Adapun kendala-kendala untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sebagian besar karena waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi, Perubahan Nomenklatur dan efisiensi pagu Anggaran Kegiatan Badan pada APBD Tahun Anggaran berjalan. Mekanisme pelaksanaannya adalah untuk disesuaikan dengan proyeksi pendapatan yang diprediksi tidak tercapai.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi atas tidak terlaksananya beberapa kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan yang baik atas setiap kegiatan. Begitu juga dengan koordinasi antar bidang lebih ditingkatkan. Selain itu, perlu juga diadakan pelatihan / bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mendukung kelancaran kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu. Koordinasi antar instansi (SKPD) dan Pemerintah Kabupaten / Kota baik dalam hal pengumpulan data dan lainnya, untuk lebih ditingkatkan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja SKPD Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu di sesuaikan dengan yang tertuang dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun berjalan. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD. Catatan tersebut antara lain terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

B A B I I I

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provsu mempunyai kaitan yang erat dimana tugas pokok dan fungsi harus mendukung Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional. Keterkaitan Prioritas pembangunan Nasional diantaranya adalah :

Agenda Pembangunan	Prioritas Pembangunan
Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.	1. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2. Meningkatkan Partisipasi Publik
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.	3. Mencegah dan memberantas korupsi
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	4. Penguatan sektor keuangan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada Pembangunan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja pemerintah serta meningkatkan Partisipasi Publik. Perlunya Akuntabilitas guna untuk mencegah dan memberantas korupsi. Kegiatan keuangan Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah dapat menjadi penguatan sektor keuangan.

Hal tersebut diatas menunjukkan adanya keterkaitan antara Prioritas pembangunan Nasional dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan, adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan Rencana Kerja-BPKAD yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, antara lain :

- a. Memanfaatkan alokasi anggaran yang tersedia secara maksimal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat ;
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, program dan kegiatan prioritas sesuai dinamika dan kebutuhan yang berkembang ;
- c. Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi serta sinergitas antar SKPD, Pemerintahan Daerah maupun Pemerintah Pusat ;
- d. Meningkatkan komunikasi dan pengembangan data serta sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
- e. Inventarisasi jumlah dan jenis pembiayaan yang didanai dari DAU, Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Sasaran, adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk mewujudkan adanya sinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan sasaran organisasi, yaitu :

- a. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan anggaran, program kegiatan dan pengelolaan APBD ;
- b. Meningkatnya aspek transparansi, partisipatif, responsibilitas dan akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.

- c. Meningkatnya jumlah dan jenis sumber-sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara maka Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, Program dan Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi dan Perkantoran , yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan administrasi. Sasaran program ini adalah peningkatan pelayanan administrasi. Program ini terdiri dari 12 kegiatan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka mendukung peningkatan kinerja. Sasaran program ini adalah peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur. Program ini terdiri dari 5 kegiatan.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Sasaran program ini adalah peningkatan kapasitas ketaatan aparatur di bidang keuangan daerah. Program ini terdiri dari 3 kegiatan.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur , yang bertujuan untuk mengefektifkan evaluasi kinerja dan membuat perencanaan seakurat mungkin serta meningkatkan kualitas laporan-laporan yang berhubungan dengan capaian kinerja dan keuangan. Sasaran program adalah peningkatan kualitas sistem pelaporan capaian kinerja sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja. Program ini terdiri dari 7 kegiatan.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemda di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sasaran program ini adalah terbitnya peraturan-peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah, meningkatnya waktu capaian atas siklus-siklus pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan hingga pelaporan serta meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemda. Program ini terdiri dari 17 kegiatan.
6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kelancaran tugas pokok dan fungsi lembaga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sasaran program ini adalah kapasitas lembaga. Program ini terdiri dari 25 kegiatan.
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan berkualitas yang bersih dan berwibawa. Sasaran program ini adalah penatausahaan. Program ini terdiri dari 15 kegiatan.

3.3. Program dan Kegiatan

A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu merupakan salah satu Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara melalui Asisten Administrasi Umum dan Aset.

Tugas Pokok Badan adalah berkaitan dengan Keuangan dan Aset yaitu :

“Merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah.”

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu menyelenggarakan fungsi :

- a. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang perbendaharaan dan kas daerah, anggaran, akuntansi dan pengelolaan aset;
- b. penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan aset;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Jumlah Program dan Kegiatan

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu Tahun Anggaran 2020 mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan yaitu:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran/Keuangan
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
11. Penyediaan Jasa Kebersihan
12. Penyediaan Jasa Keamanan

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4. Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor Sementara BPKAD
5. Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Besrta Kelengkapannya
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
3. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian BPKAD

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Bimbingan Teknis Sistem Online Penerimaan Daerah
2. Sosialisasi Pajak PPN dan PPh Pasal 22, 23, Final Pasal 4 Ayat 2
3. Sosialisasi Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah Tentang Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur Daerah Terhadap Penatausahaan Keuangan Daerah
4. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Berkaitan Dengan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kab/Kota
5. Pelatihan dan Bintek Tatacara Evaluasi APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
6. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Pemprovsu
7. Pendidikan dan Pelatihan Formal

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja
2. Penyusunan Anggaran Kas Pemprovsu APBD dan P.APBD
3. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
4. Pengelolaan Pajak PPN dan PPH
5. Penyusunan Laporan Realisasi Semester I APBD serta Prognosis 6 Bulan Berikutnya

6. Pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)
7. Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Pemprov
8. Rekonsiliasi Laporan Fungsional Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
9. Forum Grup Diskusi Akuntansi se-Sumatera
10. In House Training Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
12. Penatausahaan Belanja Bagi Hasil, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan
13. Penyusunan Renja dan Renja Perubahan BPKAD
14. Penyusunan Renstra BPKAD
15. Penyusunan RKA dan RKA Perubahan BPKAD
16. Penyusunan DPA dan DPPA BPKAD
17. Penyusunan Pelaporan Keuangan BPKAD

f. Program Peningkatan Kapasitas Kelembangan Pemerintah Daerah

1. Tim Pembinaan Administrasi Gaji PNS Daerah pada SKPD di Lingkungan Pemprov
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Sistem Cash Management System (CMS)
3. Evaluasi APBD Kabupaten/Kota
4. Pengelolaan Aplikasi E-Keuangan Terintegrasi Cash Manajemen System (CMS) dalam Penatausahaan Keuangan
5. Rekonsiliasi Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota
6. Monitoring dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota
7. Penyusunan Dan Rekapitulasi Data APBD Kabupaten/Kota
8. Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota
9. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Keuangan di Kabupaten/Kota
10. Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara

11. Penyusunan APBD Provinsi Sumatera Utara
12. Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara
13. Penyusunan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sumatera Utara
14. Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara
15. Verifikasi DPA/DPPA/DPAL SKPD Pemprov
16. Verifikasi RKA/RKA Perubahan SKPD Pemprov
17. Pengelolaan Aplikasi E- Keuangan
18. Peningkatan Proses Penganggaran di Provinsi Sumatera Utara
19. Rekonsiliasi dan Konsinyering Data Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kab/Kota
20. Koordinasi dan Pelaporan Dana Transfer Provinsi Sumatera Utara
21. Penyusunan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Perubahan Penjabaran APBD
22. Penyusunan Kebijakan dan Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah dan Evaluasi APBD/Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
23. Peningkatan Kualitas SDM dalam Rangka Evaluasi APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
24. Penyimpanan Penataan dan Pengarsipan Berkas BPKAD
25. Pengelolaan Dokumentasi dan Konten Website BPKAD

g. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pengadaan BMD Mepedomani Standar Barang dan Standar Kebutuhan
2. Evaluasi dan Penyusunan RKBMD, RKPBM, DKBMD, dan DKPBMD
3. Evaluasi Laporan Realisasi Pengadaan Barang Belanja Langsung
4. Penetapan dan Pengalihan Status BMD
5. Pengelolaan Aset dan Barang Persediaan Menggunakan Aplikasi SIMBADA BMD
6. Penaksiran/ Penilaian Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara
7. Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provsu
8. Monitoring Tindak Lanjut LHP BPK RI Perwakilan Sumatera Utara
9. Pengurusan dan Pembaharuan sertifikasi tanah milik pemprov

10. Analisis Pemakaian/Penggunaan Rumah Dinas Daerah
11. Pemuktahiran Data Aset tetap Milik Pemprovsum untuk Bahan Neraca Per 31 Desember
12. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
13. Visitas tentang Penetapan Penilaian Independen di Lingkungan Pemda sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2018
14. Pembinaan Inventarisasi dan Updating Data BMD sesuai Dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang
15. Pengamanan Aset Milik Pemprovsum Yang Bermasalah

Adapun anggaran program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah seperti table dibawah ini :

3.4. Program Dan Kegiatan Prioritas

NO	INDIKATOR KINERJA		TARGET	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	ANGGARAN	
1	3		4	5	6	
1.	1.	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD yang disusun	4		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	5.201.297.240
				1.	Penyusunan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sumatera Utara	2.659.458.620
				2.	Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara	2.541.838.620
	2.	Jumlah Dokumen RKA dan perubahan RKA yang di Verifikasi	100		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	2.858.350.000
				1.	Verifikasi RKA/RKA Perubahan SKPD Pemprov	2.858.350.000
	3.	Jumlah Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang disusun	2		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	12.486.474.120
				1.	Penyusunan APBD Provinsi Sumatera Utara	6.332.181.810
				2.	Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara	6.154.292.310
	4.	Jumlah Dokumen DPA/DPPA/DPPAL SKPD/PPKD yang di Verifikasi	100		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	2.947.750.000
				1.	Verifikasi DPA/DPPA/DPAL SKPD Pemprov	2.947.750.000
	5.	Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar	100		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	124.976.000
				1.	Peningkatan Kualitas Cash Manajement System (CMS)	124.976.000
	6.	Persentase SKPD dengan realisasi belanja di atas 95%	95		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	202.462.000
				1.	Pengelolaan Aplikasi E-Kuangan Terintegrasi Cash Manajement System (CMS) Dalam Penetausahaan Keuangan	202.462.000
7.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	1		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.448.180.800	
			1.	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	1.448.180.800	

	8.	Jumlah Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	315.672.230
				1.	Penyusunan Laporan Realisasi Semester APBD Serta Prognosis Bulan Berikutnya	315.672.230
2.	9.	Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang bersertifikat	10		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	393.614.070
				1.	Pengurusan dan Pembaharuan Sertifikasi Tanah Milik Pemprov	393.614.070
	10.	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	7		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.856.487.276
				1.	Evaluasi dan Penyusunan RKBMD, RKPBMMD, DKBMD dan DKPBMD	566.629.300
				2.	Evaluasi Laporan Realisasi Pengadaan Barang Belanja Langsung	169.910.010
				3.	Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	507.588.120
				4.	Permutakhiran Data Aset Tetap Pemprov Untuk Bahan Neraca Per 31 Desember	289.569.900
				5.	Penetapan dan Pengalihan Status BMD	322.789.946
3.	11.	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang APBD dan Perubahan APBD yang dievaluasi tepat waktu	66		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1.081.439.814
				1.	Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	1.081.439.814
	12.	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu	33		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	544.451.310
					Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	544.451.310

BAB IV

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Rencana kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sangat tergantung kepada kerjasama dan dukungan serta komitmen dan kemauan yang kuat dari seluruh komponen, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada pelaksanaan penggunaan anggaran kegiatan perlu dievaluasi antara penganggaran anggaran kegiatan dan realisasi hasil anggaran untuk mencapai output yang dipergunakan sehingga dapat dinilai keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan.

Kiranya rencana kerja ini dapat menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyusun anggaran, program dan kegiatan dan menjadi standar dalam pengukuran kinerja yang telah ditetapkan.

Medan,

**Pt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVSU**

H. RAJA INDRA SALEH, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19650624 198602 1 001

Rencana Program Dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 Provinsi Sumatera Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.2	Keuangan								
4.2.1.1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				70.000.000.000,00				68.992.433.050,00
4.2.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				6.592.500.000,00				6.597.500.000,00
4.2.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya biaya pengiriman surat, dokumen, paket dan barang BPKAD	BPKAD	3200 dokumen	100.000.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		3200 Dokumen	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	BPKAD	4 tempat	95.000.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		4 Tempat	100.000.000
4.2.1.1.1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	BPKAD	12 bulan	297.000.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		12 Bulan	297.000.000
4.2.1.1.1.4	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional BPKAD	BPKAD	145 unit	420.000.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		145 Unit	420.000.000
4.2.1.1.1.5	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran/Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran/Keuangan	BPKAD	12 bulan	1.800.000.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		12 Buah	1.800.000.000
4.2.1.1.1.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor BPKAD	BPKAD	12 bulan	400.500.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		12 Bulan	400.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.1.1.1.7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediaanya Barang Cetak dan Penggandaan	BPKAD	12 bulan	400.000.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		12 Bulan	400.000.000
4.2.1.1.1.8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat Kabar/Majalah/Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	12 bulan	80.000.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		12 Bulan	80.000.000
4.2.1.1.1.9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Untuk ASN, Tamu dan Kegiatan	BPKAD	12 bulan	300.000.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		12 Bulan	300.000.000
4.2.1.1.1.10	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Dan Luar Daerah	Pelaksanaan rapat koordinasi/konsultasi pejabat dan staf kedalam dan luar daerah	BPKAD	12 bulan	2.500.000.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		12 Bulan	2.500.000.000
4.2.1.1.1.11	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Pada Bangunan BPKAD	BPKAD	12 bulan	100.000.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		12 Bulan	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.1.1.1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya Jasa Keamanan Untuk Aset BPKAD	BPKAD	12 bulan	100.000.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		12 Bulan	100.000.000
4.2.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				8.238.359.250,00				8.237.443.250,00
4.2.1.1.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD	1 kegiatan	1.513.416.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		1 OPD	1.512.500.000
4.2.1.1.2.3	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Roda Dua Dan Empat	BPKAD	1 kegiatan	1.499.943.250	APBD Provinsi Sumatera Utara		200 Unit	1.499.943.250
4.2.1.1.2.4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	BPKAD	1 kegiatan	1.995.000.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		1 OPD	1.995.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.1.1.2.5	Penyediaan Jasa Sewa Gedung Sementara BPKAD	Tersedianya Jasa Sewa Gedung Sementara BPKAD	BPKAD	12 bulan	2.730.000.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		1 OPD	2.730.000.000
4.2.1.1.2.6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Bangunan/Gedung Aset BPKAD	BPKAD	12 bulan	500.000.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		1 OPD	500.000.000
4.2.1.1.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				999.865.000,00				999.865.000,00
4.2.1.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	BPKAD	1 kegiatan	382.500.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		150 Orang	382.500.000
4.2.1.1.3.3	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	BPKAD	1 kegiatan	317.650.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		Orang	317.650.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.1.1.3.4	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian BPKAD	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian BPKAD	Sekretariat	12 bulan	299.715.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		1 OPD	299.715.000
4.2.1.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				2.870.974.000,00				2.870.974.000,00
4.2.1.1.5.1	Bimbingan Teknis Sistem Online Penerimaan Daerah	Bimbingan Teknis Sistem Online Penerimaan Daerah	Perbend Kasda	1 kegiatan	183.142.700	APBD Provinsi Sumatera Utara		52 OPD	183.142.700
4.2.1.1.5.2	Sosialisasi Pajak PPN dan PPh Pasal 22, 23, Final Pasal 4 Ayat 2	Sosialisasi Pajak PPN dan PPh Pasal 22, 23, Final Pasal 4 Ayat 2	Perbend Kasda	1 kegiatan	149.153.700	APBD Provinsi Sumatera Utara		52 OPD	149.153.700

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.1.1.5.3	Sosialisasi Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah Tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Daerah Terhadap Penatausahaan Keuangan Daerah	Sosialisasi Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah	Perbend Kasda	1 kegiatan	390.737.200	APBD Provinsi Sumatera Utara		52 OPD	390.737.200
4.2.1.1.5.4	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Berkaitan Dengan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kab/Kota	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Berkaitan Dengan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kab/Kota	Bina Keuda	1 kegiatan	1.334.275.600	APBD Provinsi Sumatera Utara		100 Orang	1.334.275.600
4.2.1.1.5.5	Pelatihan Dan Bimtek Tatacara Evaluasi APBD Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Pelatihan Tatacara Evaluasi APBD Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Bina Keuda	1 kegiatan	473.067.800	APBD Provinsi Sumatera Utara		70 Orang	473.067.800
4.2.1.1.5.6	Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua di Lingkungan Pemprov	Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua di Lingkungan Pemprov	Akuntansi	1 kegiatan	140.226.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		52 OPD	140.226.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.1.1.5.8	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Updating Kapasitas ASN BPKAD	Sekretariat	145 orang	200.371.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		145 Orang	200.371.000
4.2.1.1.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				5.696.829.500,00				5.696.829.500,00
4.2.1.1.6.1	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja	Tersusunnya Lakip dan Dokumen Penetapan Kinerja	Sekretariat	2 dokumen	39.000.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		1 Laporan	39.000.000
4.2.1.1.6.2	Penyusunan Anggaran Kas Pemprov APBD dan Perubahan APBD	Penyusunan Anggaran Kas Pemprov APBD dan Perubahan APBD	Perbend Kasda	2 dokumen	46.152.900	APBD Provinsi Sumatera Utara		2 Dokumen	46.152.900

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.1.1.6.3	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah	Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah	Perbend Kasda	1 dokumen	568.915.900	APBD Provinsi Sumatera Utara		1 Dokumen	568.915.900
4.2.1.1.6.4	Pengelolaan Pajak PPN dan PPh	Pajak PPN dan PPh Disetor Tepat Waktu	Perbend Kasda	1 kegiatan	361.218.500	APBD Provinsi Sumatera Utara		1 Kegiatan	361.218.500
4.2.1.1.6.5	Penyusunan Laporan Realisasi Semester I APBD Serta Prognosis 6 Bulan Berikutnya	Laporan Realisasi Semester I APBD Serta Prognosis 6 Bulan Berikutnya	Akuntansi	1 dokumen	377.726.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		1 Laporan	377.726.000
4.2.1.1.6.6	Pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)	Pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)	Akuntansi	1 kegiatan	288.607.400	APBD Provinsi Sumatera Utara		1 Kegiatan	288.607.400
4.2.1.1.6.7	Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Pemprov	Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Pemprov	Akuntansi	1 kegiatan	293.240.400	APBD Provinsi Sumatera Utara		1 Kegiatan	293.240.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.1.1.6.8	Rekonsiliasi Laporan Funkisional Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran	Laporan Funkisional dan LRA PemprovSU	Akuntansi	1 kegiatan	135.466.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		52 OPD	135.466.000
4.2.1.1.6.9	Forum Grup Diskusi Akuntansi se-Sumatera Utara	Terselenggaranya Forum Grup Diskusi Akuntansi se-Sumatera Utara	Akuntansi	1 kegiatan	335.891.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		1 Kegiatan	335.891.000
4.2.1.1.6.10	In House Training Pengelolaan Keuangan Daerah	In House Training Pengelolaan Keuangan Daerah	Akuntansi	1 kegiatan	326.316.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		1 Kegiatan	326.316.000
4.2.1.1.6.11	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Akuntansi	1 laporan	1.700.353.400	APBD Provinsi Sumatera Utara		1 Kegiatan	1.700.353.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.1.1.6.12	Penatausahaan Belanja Bagi Hasil, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan	Laporan Penatausahaan Belanja Bagi Hasil, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan	Sekretariat	1 laporan	909.835.600	APBD Provinsi Sumatera Utara		1 Laporan	909.835.600
4.2.1.1.6.13	Penyusunan Renja Dan Renja Perubahan BPKAD	Renja dan Renja Perubahan BPKAD	Sekretariat	2 dokumen	14.500.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		2 Laporan	14.500.000
4.2.1.1.6.14	Penyusunan Renstra BPKAD	Renstra BPAKD	Sekretariat	1 dokumen	21.250.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		Orang	21.250.000
4.2.1.1.6.15	Penyusunan RKA dan RKA perubahan BPKAD	RKA dan RKA Perubahan	Sekretariat	2 dokumen	47.400.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		2 Dokumen	47.400.000
4.2.1.1.6.16	Penyusunan DPA dan DPPA BPKAD	DPA Dan DPPA	Sekretariat	2 dokumen	31.150.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		2 Dokumen	31.150.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.1.1.6.17	Penyusunan Pelaporan Keuangan BPKAD	Laporan Keuangan BPAKD	Sekretariat	1 dokumen	199.806.400	APBD Provinsi Sumatera Utara		1 Dokumen	199.806.400
4.2.1.1.107	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				36.020.191.650,00				35.008.540.700,00
4.2.1.1.107.1	Pembinaan Gaji PNS Daerah Pada SKPD di Lingkungan Pemprov	Pembinaan Gaji PNS Pemprov	Perbend Kasda	12 bulan	361.628.500	APBD Provinsi Sumatera Utara		1 Kegiatan	361.628.500
4.2.1.1.107.2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Cash Management System (CMS)	Kualitas Pelayanan Cash Management System Meningkat	Perbend Kasda	1 kegiatan	226.923.600	APBD Provinsi Sumatera Utara		1 Kegiatan	226.923.600
4.2.1.1.107.3	Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	SK Gubsu Tentang Hasil Evaluasi Ranperda APBD/PAPBD dan Ranperkada Penjabaran APBD/PAPBD	Bina Keuda	33 kab/kota	1.723.524.200	APBD Provinsi Sumatera Utara		33 Kab/kota	1.723.524.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.1.1.107.4	Pengelolaan Aplikasi E-Kuangan Terintegritasi Cash Management System (CMS) Dalam Penatausahaan Keuangan	Integrasi Aplikasi Penatausahaan Keuangan Dengan Cash Management System	Perbend Kasda	12 bulan	450.893.600	APBD Provinsi Sumatera Utara		12 Bulan	450.893.600
4.2.1.1.107.5	Rekonsiliasi Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rekonsiliasi Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Bina Keuda	1 kegiatan	282.994.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		33 Kab/kota	282.994.000
4.2.1.1.107.6	Monitoring dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota	Laporan Monitoring dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi APBD Kab/Kota	Bina Keuda	12 bulan	726.792.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		33 Kab/kota	726.792.000
4.2.1.1.107.7	Penyusunan dan Rekapitulasi Data APBD Kabupaten/Kota	Penyusunan Rekapitulasi Data APBD Kab/Kota se-Sumut	Bina Keuda	12 bulan	954.381.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		33 Kab/kota	954.381.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.1.1.107.8	Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	SK Gubsu tentang Hasil Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperkada Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Bina Keuda	33 kab/kota	883.027.400	APBD Provinsi Sumatera Utara		33 Kab/kota	883.027.400
4.2.1.1.107.9	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Keuangan di Kabupaten/Kota	Pembinaan Dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Keuangan Di Kabupaten/Kota	Bina Keuda	33 kab/kota	544.992.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		33 Kab/kota	544.992.000
4.2.1.1.107.10	Rapat Koordinasi dan Rapat Teknis Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota se-Sumut	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota se-Sumut	Bina Keuda	1 kegiatan	597.920.600	APBD Provinsi Sumatera Utara		33 Kab/kota	597.920.600
4.2.1.1.107.11	Penyusunan APBD Provinsi Sumatera Utara	Buku Ranperda tentang APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran APBD	Anggaran	150 Buku	5.397.492.600	APBD Provinsi Sumatera Utara		150 Buku	5.397.492.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.1.1.107.12	Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara	Buku Ranperda tentang Perubahan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran Perubahan APBD	Anggaran	150 Buku	5.119.484.350	APBD Provinsi Sumatera Utara		150 Orang	4.107.833.400
4.2.1.1.107.13	Penyusunan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sumatera Utara	Buku KUA Dan PPAS	Anggaran	150 Buku	2.523.439.600	APBD Provinsi Sumatera Utara		150 Orang	2.523.439.600
4.2.1.1.107.14	Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara	Buku KUA Dan PPAS Perubahan	Anggaran	150 Buku	2.536.928.400	APBD Provinsi Sumatera Utara		150 Orang	2.536.928.400
4.2.1.1.107.15	Verifikasi DPA/DPPA/DPAL SKPD Pemprov	DPA/DPPA/DPAL SKPD Pemprov	Anggaran	52 OPD	2.897.750.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		52 OPD	2.897.750.000
4.2.1.1.107.16	Verifikasi RKA/RKA Perubahan SKPD Pemprov	RKA/RKA Perubahan SKPD Pemprov	Anggaran	52 OPD	2.894.750.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		52 OPD	2.894.750.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.1.1.107.17	Pengelolaan Aplikasi E-Kuangan	Terlaksana dan Terkelolanya Aplikasi E-Kuangan Dengan Baik	Anggaran	12 bulan	1.985.390.400	APBD Provinsi Sumatera Utara		52 OPD	1.985.390.400
4.2.1.1.107.18	Peningkatan Proses Penganggaran di Provinsi Sumatera Utara	Terwujudnya Penyusunan APBD Yang Baik	Anggaran	1 kegiatan	132.404.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		1 Dokumen	132.404.000
4.2.1.1.107.19	Rekonsiliasi Dan Konsinyering Data Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kab/Kota	Laporan Rekonsiliasi Periodik dan Berita Acara Rekonsiliasi Data serta Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara Memahami Tata Cara Rekonsiliasi Kontribusi Bagi Hasil Pajak Rokok Dengan BPJS Kesehatan	Anggaran	100 laporan	1.283.395.400	APBD Provinsi Sumatera Utara		33 Kab/kota	1.283.395.400
4.2.1.1.107.20	Koordinasi dan Pelaporan Dana Transfer Provinsi Sumatera Utara	Laporan Dana Transfer Provsu	Anggaran	1 laporan	1.638.136.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		1 Laporan	1.638.136.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.1.1.107.21	Penyusunan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tentang Perubahan Penjabaran APBD	Pergub Tentang Perubahan Penjabaran APBD	Anggaran	150 Buku	1.635.924.800	APBD Provinsi Sumatera Utara		150 Orang	1.635.924.800
4.2.1.1.107.22	Penyusunan Kebijakan dan Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah dan Evaluasi APBD/ Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota se-Sumut Sesuai Dengan Peraturan Perundangan	Bina Keuda	33 kab/kota	325.315.600	APBD Provinsi Sumatera Utara		33 Kab/kota	325.315.600
4.2.1.1.107.23	Peningkatan Kualitas SDM dalam rangka Evaluasi APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Pemahaman ASN Terhadap Penyusunan APBD Meningkat	Bina Keuda	1 kegiatan	296.753.600	APBD Provinsi Sumatera Utara		20 Orang	296.753.600
4.2.1.1.107.24	Penyimpanan Penataan Dan Pengarsipan Berkas BPKAD	Penyimpanan Penataan Dan Pengarsipan Berkas BPKAD	Sekretariat	1 kegiatan	399.950.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		1 OPD	399.950.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.1.1.107.25	Pengelolaan Dokumentasi Dan Konten Website BPKAD	Dokumentasi dan Konten Website	Sekretariat	1 kegiatan	200.000.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		1 OPD	200.000.000
4.2.1.1.110	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				9.581.280.600,00				9.581.280.600,00
4.2.1.1.110.1	Pengadaan BMD Mepedomani Standar Barang dan Standar Kebutuhan	Penyusunan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Pemprov	Aset	1 dokumen	897.443.200	APBD Provinsi Sumatera Utara		1 Dokumen Laporan	897.443.200
4.2.1.1.110.2	Evaluasi dan Penyusunan RKBMD, RKPBM, DKBMD dan DKPBM	Buku RKBMD, RKPBM, DKBMD dan DKPBM	Aset	52 OPD	1.154.321.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		52 OPD	1.154.321.000
4.2.1.1.110.3	Evaluasi Laporan Realisasi Pengadaan Barang Belanja Langsung	Buku Realisasi Pengadaan Barang Belanja Langsung	Aset	52 Buku	231.342.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		52 OPD	231.342.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.1.1.110.4	Penetapan dan Pengalihan Status BMD	Buku Pemanfaatan Penetapan Status BMD	Aset	52 Buku	748.517.700	APBD Provinsi Sumatera Utara		52 OPD	748.517.700
4.2.1.1.110.5	Pengelolaan Aset dan Barang Persediaan Menggunakan Aplikasi Simbada BMD	Terlaksananya Pembinaan Aplikasi SIMDA BMD Kepada SKPD Lingkungan Pemprovsu	Aset	3 kegiatan	1.567.007.800	APBD Provinsi Sumatera Utara		52 OPD	1.567.007.800
4.2.1.1.110.8	Penaksiran/Penilaian Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara	Berita Acara Penaksiran/Penilaian BMD Pemrovsu	Aset	52 dokumen	448.798.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		52 OPD	448.798.000
4.2.1.1.110.9	Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provsu	SK Gubsu tentang Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provsu	Aset	52 dokumen	712.627.600	APBD Provinsi Sumatera Utara		52 OPD	712.627.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.1.1.110.10	Monitoring Tindak Lanjut LHP BPK RI Perwakilan Sumatera Utara	Laporan Monitoring Tindak Lanjut LHP BPK RI Perwakilan Sumatera Utara	Aset	1 laporan	211.735.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		52 OPD	211.735.000
4.2.1.1.110.12	Pengurusan dan Pembaharuan Sertifikasi Tanah Milik Pemprovsu	Sertifikat Tanah Pemprovsu	Aset	310 dokumen	607.920.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		52 OPD	607.920.000
4.2.1.1.110.15	Analisis Pemakaian/Penggunaan Rumah Dinas Daerah	Terdatanya Para Pemakai/Pengguna Rumah Dinas Daerah	Aset	1 laporan	339.633.600	APBD Provinsi Sumatera Utara		52 OPD	339.633.600
4.2.1.1.110.16	Pemutakhiran Data Aset Tetap Milik Pemprovsu Untuk Bahan Neraca Per 31 Desember	Laporan Data Aset Tetap dan Lancar Milik Pemprovsu	Aset	52 OPD	408.076.200	APBD Provinsi Sumatera Utara		52 OPD	408.076.200
4.2.1.1.110.17	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Aset	1 kegiatan	409.601.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		52 OPD	409.601.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2.1.1.110.18	Visitasi Tentang Penetapan Penilaian Independen di Lingkungan Pemda Sesuai Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2018	Terbentuknya Pengetahuan ASN tentang Penilaian Independen BMD	Aset	1 kegiatan	306.231.100	APBD Provinsi Sumatera Utara		52 OPD	306.231.100
4.2.1.1.110.19	Pembinaan Inventarisasi dan Updating Data BMD Sesuai Dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang	Tersusunnya Penggolongan dan Kodefikasi BMD Pemprovsu	Aset	1 kegiatan	1.228.080.400	APBD Provinsi Sumatera Utara		52 OPD	1.228.080.400
4.2.1.1.110.20	Pengamanan Aset Milik Pemprovsu Yang Bermasalah	Pemetaan Permasalahan Aset Pemprovsu	Aset	30 laporan	309.946.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		52 OPD	309.946.000
Total					70.000.000.000				68.992.433.050